

PENISTAAN AGAMA DAN KEKERASAAN SOSIAL DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Purjatian Azhar

Direktur Lembaga Kajian Konflik dan Perdamaian (LKKP) Yogyakarta
purjaazhar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang konflik dan kekerasan yang terjadi pasca perusakan gereja pada tahun 2011. Kasus penistaan agama dan perusakan gereja di Temanggung merupakan kasus yang paling menonjol setelah kasus penangkapan teroris. Kasus ini bahkan menjadi sorotan dunia internasional karena akibat dari kejadian ini empat gereja dibom molotov dan dibakar. Tidak hanya itu, kerusuhan juga menyebabkan gedung Pengadilan Negeri Temanggung mengalami kerusakan, serta kendaraan operasional, pos polisi dan satu panti asuhan Betlehem yang juga ikut dirusak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat membuat kota Temanggung mencekam dan mendadak menjadi 'terkenal'. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Temanggung disebabkan karena kurangnya pemahaman agama masyarakat terhadap agama yang dianutnya sehingga masyarakat sangat mudah untuk di provokasi, kemudian dari konflik itu akhirnya menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Bupati, TNI/Polri, FKUB dan lembaga lainnya dituntut untuk bekerja keras dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara penyuluhan ke desa-desa, kemudian ke pengajian dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi dan rasa aman. Namun hal itu tidak mudah karena pasti ada kendala yang dirasakan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait, oleh karena hal yang dianggap membantu sebagai solusi alternatifnya adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat. Meskipun sebenarnya kearifan lokal belum mampu seentuhnya untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Key words: Konflik, Kekerasan Sosial

Pendahuluan

Kasus penistaan agama di Temanggung bermula dari kedatangan Antonius Richmond Bawengan dari Jakarta ke rumah saudaranya yang berada dilingkungan Kenalan, kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Oktober 2010. Bawengan merupakan seseorang keturunan Manado ini, akhirnya menginap karena kehabisan kendaraan umum untuk menuju Magelang.¹ Pada pagi harinya, Bawengan menyebarkan buku di halaman rumah warga, yakni buku yang berjudul “Ya Tuhan ku, Tertipu aku” dan “Saudara Perlukah Sponsor (3 Sponsor, 3 Agenda dan 3 Hasil)”. Buku pertama ini berisi tentang dugaan penghinaan terhadap agama Islam, Kristen dan Katolik. Buku tersebut disebar di halaman rumah warga, termasuk rumah tokoh desa setempat.

Apa yang dilakukan Bawengan dengan menyebarkan buku yang berisi tentang penistaan agama menjadi keresahan bagi masyarakat setempat. Karena terjadi keresahan oleh warga, kemudian ketua RT setempat, Fakhurrozi mengamankan Bawengan, mencoba untuk melindungi agar tidak diamuk oleh warga yang resah. Fakhurrozi sendiri adalah seorang anggota kepolisian Polsek Temanggung. Bersama masyarakat sekitar akhirnya membawa Bawengan ke Polsek Kranggan untuk dilaporkan secara resmi sebagai tindakan penistaan agama.

Antonius Richmond Bawengan akhirnya ditahan oleh pihak yang berwajib setelah berkas perkara pelaporannya lengkap. Bawengan sendiri berasal dari kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dan akhirnya dijerat dengan pasal 156 huruf a KUHP sebagai penjerat primer dan pasal 156 KUHP sebagai penjerat subsider dengan ancaman hukuman

¹Hasil wawancara dengan Gus Furqon, pada tanggal 30 April 2015 di kantor PCNU Kabupaten Temanggung, Gus Furqon sendiri merupakan ketua PCNU Kabupaten Temanggung untuk masa Khidmat 2014-2018

penjara maksimal 5 tahun. Pada 26 Oktober 2010, Bawengan resmi ditahan diruang tahanan Polres Temanggung.²

Proses Awal

Selanjutnya polisi kemudian melakukan penyidikan terhadap tersangka Bawengan. Hasil penyidikan tersebut kemudian setelah lengkap diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Temanggung untuk dilakukan pemerosesan lanjutan dengan pembuatan rencana tuntutan dan rencana dakwaan. Pada 21 November 2010, berkas perkara kasus penistaan agama atas nama tersangka Antonius Richmond Bawengan dinyatakan telah lengkap (P21).

Setelah diserahkan ke Pengadilan Negeri Temanggung sebagai pelaksana persidangan kasus ini, pada 13 Januari 2011 dilakukan sidang pertama dengan agenda persidangan yaitu pembacaan dakwaan. Pada sidang perdana ini, menurut beberapa orang yang penulis wawancarai, diruang persidangan tidak terlalu banyak dikunjungi oleh masyarakat. Hanya beberapa tokoh LSM yang hadir pada sidang ini. Persidangan berlanjut seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Januari 21011. Persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Dwi Dayanto SH dengan menghadirkan saksi ahli yaitu Fakhurrozi (Ketua RT dan Anggota Kepolisian), Bambang Suryoko (warga penerima buku) dan Agus Adi Cahyono (warga penerima buku). Pada persidangan kedua, telah berdatangan ratusan massa yang mengenakan pakaian putih ke ruang persidangan.

Persidangan selanjutnya berlangsung pada kamis 27 Januari 2011, sidang ketiga ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, termasuk saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Temanggung, Ahmad Faizun. Polisi telah siaga dari awal dengan menerjunkan anggota Brimob Polda Jawa

² wawancara dengan Abaz Zahrotien pada tanggal 23 April 2015, Abaz sendiri merupakan seorang jurnalis dari media jawa pos yang bertugas di Radar kedu serta meliput kejadian kerusuhan pada saat kerusuhan berlangsung

Tengah, dua unit mobil baracuda, water canon dan senjata api lainnya. Pada persidangan ini tidak terlalu terjadi keributan, namun setelah persidangan usai, masa berlarian mengejar terdakwa Bawengan yang diamankan menggunakan mobil baracuda.

Massa yang marah kemudian melakukan sweeping ke seluruh ruang Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencari terdakwa Bawengan. Namun polisi yang telah mengamankan terdakwa menyebabkan massa akhirnya mengambil jalan lain, menyerbu rumah tahanan (Rutan) kelas II B Temanggung yang menjadi tempat pemenjaraan terdakwa Bawengan. Dgedung rutan Temanggung massa melakukan pelemparan batu kedalam gedung penjara dan merusak satu unit mobil operasional milik rutan yang diparkir.³

Massa akhirnya mengamuk diluar gedung pengadilan, satu unit truk polisi dibakar dan puluhan sepeda motor dirusak. Massa juga melempari gedung Pengadilan Negeri Temanggung dengan bom molotov dan melempari aparat dengan menggunakan batu dan ketapel. Massa kemudia berjalan menyusuri jalan jendral sudirman, melawati panti asuhan betlehem, massa melempari panri tersebut dengan batu sehingga merusak bagian depan panti. Penghuni panti akhirnya dievakuasi melalui jalur belakang ke SD Pangudi Utami karena panik. Selanjutnya, massa juga merusak pos polisi di perempatan Telkom.

Dalam kondisi dan situasi yang sudah tidak terkontrol, kemudian massa terbelah menjadi dua, masing-masing menyusuri jalan Suyoto menuju sekoloah Shekinah dan melakukan perusakan dan pengeboman dari luar gedung derta Gerja Katolik Santo Petrus dan Paulus di jalan jendral Sudirman bersebelahan dengan Polres Temanggung. Massa juga melakukan perusakan yang sama dan diakhiri dengan perusakan serupa di Gereja Pantekosta di

³ Wawancara dengan Kyai Sihabuddin, Ketua FPI Jawa Tengah, tanggal 8 April 2015

Indonesia (Gpdl) Temanggung.⁴ Beberapa mobil dan motor dibakar digereja tersebut, sementara satu gereja lainnya yakni Gereja Pantekosta di Indonesia (Gpdl) Tegowanuh, desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung dirusak massa saat dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Temanggung pagi sebelum persidangan digelar.

Setelah kejadian tersebut, polisis akhirnya melakukan penangkapan terhadap puluhan orang yang diduga melakukan tindak perusakan tersebut. Provokator utama tersebut ternyata adalah Syihabudin yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al hadits, Dusun batok, Desa Kebon sari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung dan juga merupakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah. Beberapa terduga yang ditangkap dilepaskan kembali karena tidak cukup bukti, namun polisi meminta untuk wajib lapor sebagai bagian tanggung jawab atas perbuatan yang sudah mereka lakukan.

Dari kejadian tersebut tidak sedikit jatuh korban akibat emosi massa yang tidak terkontrol. Data dari RSUD Djojonegoro Temanggung mencatat ada sembilan orang yang dirawat akibat aksi kericuhan tersebut. Dokter umum yang memeriksa para korban, dokter Willy Hartanto mengatakan, sembilan orang itu mengalami luka dengan rata-rata terjadi di bagian kepala dan kaki."Namun, pihak rumah sakit belum dapat memastikan apakah luka itu disebabkan karena terkena peluru karet. Dari pemeriksaan yang dilakukan luka itu diduga karena terkena benda tumpul dan keras, sehingga kemungkinan luka itu karena terkena lemparan batu.⁵

Sembilan orang korban yang terluka, antara lain yaitu Solahudin, 44, warga Mandisari; Raihanif, 15, warga Dusun Noyogaten, Desa Bandunggede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Mardiyono, 49, warga Dusun Brawal, Desa

⁴Hasil wawancara dengan Iwan Setyawan, pada tanggal 16 April 2015, Iwan sendiri merupakan masyarakat katolik yang tinggal dibelakang pasar Kliwon yang bersebelahan dengan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Temanggung.

⁵ Wawancara dengan AKP Setuiya Budi (Kasat Intelkam Polres Temanggung), tanggal 23 2015

Campursari, Kecamatan Bulu, Temanggung, Iwan, 37, warga Jalan Letjend S Parman, Temanggung; Sukarman, 28, Desa Campursari, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Selain itu, Supangan, 15, Ngablak, Magelang, Jurewi, 18, warga Tanggulanom, Temanggung; Sriyati, 55, Kedu Gang 3 Temanggung, dan Andi 22, Kuduwuluh, Kedu, Temanggung. "Namun untuk Iwan dan Sriyati sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan saja."⁶

Apa yang dialami para korban atas tindakan anarkis massa merupakan tindakan kekerasan langsung (*Direct Violence*). Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung, seperti pemukulan, pelemparan, pembunuhan terhadap orang atau kelompok tertentu, atau penembakan aparat negara terhadap para demonstran. Hal ini terjadi karena sebagai upaya difensif dari pihak aparat terhadap massa yang mungkin dianggap berlebihan dan bahkan anarkis.

Gesekan antara massa dan aparat kepolisian seakan mengingatkan kita pada banyak peristiwa kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik kekerasan atas nama agama ataupun kekerasan atas nama yang lain. Bila melihat kebelakang maka konflik yang mengatasnamakan agama tidak hanya terjadi di temanggung, sebelumnya kita dapat melihat kejadian yang hampir sama seperti perusakan masjid ahmadiyah di berbagai kota di indonesia dan sebagainya.

Perusakan Gereja dan Kekerasan Sosial

Tindakan kekerasan yang meledak pasca vonis lima tahun Penjara terhadap terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmond Bawengan Selasa, 8 Februari 2011, dan berujung pada kekerasan sosial seperti; pembakaran mobil, gereja serta perkantoran, memberi pelajaran kepada kita

⁶Hasil wawancara dengan Abaz Zahrotien pada tanggal 23 April 2015, Abaz sendiri merupakan seorang jurnalis dari media jawa pos yang bertugas di Radar kedu serta meliput kejadian kerusuhan pada saat kerusuhan berlangsung.

semua, bahwa pemicu konflik⁷ dapat berbentuk apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kerusuhan Temanggung telah memberi bukti nyata bahwa kekerasan sosial dengan motif-motif yang beragam seperti identitas keagamaan terkadang masih menjadi persoalan yang tidak main-main. Ia akan dengan mudah disulut oleh sentimen-sentimen identitas yang sesungguhnya bisa sangat sederhana.⁸

Tindak kekerasan yang terjadi di Temanggung yang kemudian dibungkus atas nama keyakinan keagamaan seakan memberikan pesan bahwa peta harmoni dari panorama keberagaman di Indonesia sudah goyah, rapuh dan radikalisme agama, sosial, budaya menyeruak ke permukaan dengan intensitas kekerasan yang mengganggu jalinan kebersamaan serta kohesi sosial. Sepertinya di dalam kehidupan masyarakat ada tanda-tanda yang menunjukkan sifat-sifat kebencian yang berujung pada kekerasan sosial. Namun ibarat api dalam sekam, artinya bahwa konflik identitas sosial, seperti agama, etnis, ras, selalu menuju titik kekerasan sosial sesungguhnya peristiwa yang suatu saat akan bisa muncul dengan tiba-tiba. Terlebih masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat majemuk atau heterogen sehingga persinggungan didalam interaksi sosial yang bisa menyinggung perasaan salah satu pihak akan berujung pada kekerasan sosial.

Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pudarnya nilai-nilai moral, agama semua tumpah ruah dan seakan tak henti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tindak kekerasan, atau bahkan kemiskinan merupakan komponen yang paling seksi dan provokatif sebagai pemicu timbulnya kerawanan sosial. Meskipun pemicu konflik seringkali berawal dari keyakinan keagamaan, etnik,

⁷Konflik berarti mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Lebih lanjut konflik sebenarnya hanyalah suatu perbedaan atau salah paham. Kata-kata serupa itu seringkali disampaikan oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah konflik. Dengan kata lain, konflik tidak dinilai sebagai hal yang terlalu serius, konflik hanyalah kegagalan berkomunikasi, sehingga pihak lain tidak dapat memahami maksud kita yang sesungguhnya. Lihat Robby I. Chandra, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992). hlm. 16

⁸Diryo Suparto, *Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung, Kajian Kekerasan Sosial Di Temanggung Tahun 2011, 2013*. hlm. 4

ras. Meminjam perspektif Usman Pelly, bahwa kerusuhan etnik berakar dari kesenjangan sosial ekonomi dan merupakan protes budaya yang memberikan petunjuk kuat bahwa tatanan sosial dalam kehidupan majemuk telah dilanggar dan dihancurkan.⁹

Ataukah memang konflik atas nama identitas sosial, etnis, agama, ras, suku seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia? Menurut Amien Maalouf, mengapa begitu banyak orang melakukan kejahatan pada masa sekarang ini atas nama agama, etnis, nasional, atau bermacam identitas lainnya.¹⁰

Lebih jauh bahkan Maalouf, menjelaskan bahwa identitas merefleksikan sebuah gagasan yang cukup presisi, gagasan yang secara teori mestinya tidak menimbulkan kebingungan. Apalagi kemudian seseorang bisa melakukan apa saja atas nama identitas kelompoknya. Masih menurut Maalouf, identitas tiap individu tersusun dari sejumlah unsur, dan unsur-unsur ini bukan sebatas pada hal-hal khusus yang tercantum dalam catatan resmi. Faktor-faktor terbesar ini mencakup pertalian pada suatu tradisi keagamaan, pada suatu nasionalitas, pada suatu profesi, institusi, atau lingkup sosial tertentu. Hal senada juga disampaikan oleh Charles Kimball dalam bukunya *Kala Agama Jadi Bencana*, dalam buku tersebut Kimball lebih menekankan pada aspek religiusitas masyarakat saat ini, Kimball mengatakan dalam satu sisi agama dianggap sebagai sebuah ajaran yang mengajarkan manusia pada kebaikan, saling menghormati dan bersikap toleransi, namun disatu sisi agama juga dapat menjadi sumber bencana tak kala agama dipahami secara persial oleh para pemeluk agama, aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh bawengan yang menyebarkan fitnah merupakan hasil dari pemahaman keagamaan yang cenderung bersifat provokatif.¹¹

⁹ Usman Pelly, *Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia : Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*. (Dalam Jurnal Antropologi Indonesia. No. 58 Tahun 1999), hlm. 34.

¹⁰ Amin Maalouf, *In The Name of Identity* (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 9-10.

¹¹ Charles Kimball, *Kala Agama Jadi Bencana*, (Bandung: Mizan, 2003). hlm. 77-86.

Kemudian dalam konteks yang lain, beberapa kerusuhan sosial yang terjadi karena menggambarkan adanya politik identitas sosial, keagamaan, etnis, kesukuan yang telah menjadi pertalian seseorang dalam hidupnya. Lantas, berasal dari manakah identitas itu lahir sehingga kemudian banyak orang bergegas gempita menjadi pengikut setia bahwa mengusung identitas dengan penuh kesetiaan dan terkadang membabi buta.¹² Bahkan identitas telah menjadi ajaran, doktrin dan dipercaya itu bisa membuat banyak orang menguras energi mereka untuk menguras kemarahan. Apa yang sesungguhnya terjadi jika identitas seseorang disinggung sedikit saja, mereka lantas rela melakukan apa saja demi membela identitasnya.¹³

Tetapi bagaimanapun juga kekerasan yang mengatasnamakan identitas sosial, seperti agama, disisi lain juga merupakan tantangan dan cobaan bahwa agama sedang mengalami ujian sejarah secara kritis, dimana bandul pendulum agama mengarahkan pengikut-pengikutnya pada dua sisi yang berlawanan, dimana satu sisi humanisasi dan disisi lain dehumanisasi.¹⁴ Semua itu tergantung bagaimana persepsi yang membentuk perilaku pengikut-pengikutnya. Begitu pula dengan konflik identitas etnis, karena setiap etnis memiliki corak, kepercayaan yang berbeda dalam mengekspresikan dan mengartikulasikan kebudayaannya, sehingga bila terjadi ekspresi dan artikulasi kelompok lain yang berbeda etnik dan menggeser budaya dominan mereka maka akan muncul prasangka-prasangka sosial. Stereotipe-stereotipe tentang pergeseran peran budaya yang sudah ada, dan akan tergantikan oleh budaya lain, seperti terjadi di Ambon, justru menjadi pemicu yang hebat dan lama terselesaikan.

¹²Hugh Miall Dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 247-251

¹³Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik, Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm. 21-26

¹⁴Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial, Studi Pengalaman Indonesia*, (Bandung: Marja, 2013). hlm. 61-65.

Sesungguhnya, dalam banyak kasus, konflik dan kekerasan bernuansa etnik, agama yang pecah di tengah masyarakat lebih dilatarbelakangi kondisi sosial, ekonomi, dan politik daripada perbedaan keyakinan. Bahkan agama, etnik, ras, suku sering diperalat sebagai faktor legitimasi untuk menggerakkan emosi dan solidaritas primordial. Sejarah membuktikan, manipulasi agama, etnik, ras, suku untuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik sangat membahayakan kehidupan suatu negara bangsa. Agama, etnik, ras sering dijadikan alat pemicu kekerasan. Meskipun ada faktor-faktor lain yang selalu berlindung di ketiak agama, etnis, ras, suku, sehingga seakan ia telah mendapatkan legitimasi dari identitas sosial.

Konflik sosial menurut Sulaeman Munandar, bahwa sesungguhnya fenomena konflik sosial yang sering muncul belakangan ini merupakan indikator dari adanya proses transformasi sosial yang sedang berlangsung, berupa representasi benturan nilai sosial dan nilai agama serta sedang terjadi pergeseran setting penguasaan sumberdaya strategis berupa kekuasaan atau politik dan ekonomi. Mungkin adanya pergeseran-pergeseran peran kelompok dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pertentangan dan kontradiksi atau disorganisasi struktur, kultur dan pola relasional antar individu dan kelompok.¹⁵

Masih menurut Sulaeman Munandar, Konflik identitas yang bersifat horizontal antara golongan masyarakat juga merupakan dampak dari polarisasi dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik atau terjadinya orientasi golongan dan keagamaan yang mempertajam perbedaan dan kepentingan.

Maka jika dilihat apa yang terjadi di Temanggung, tak jauh-jauh dari polisasi ekonomi kehidupan masyarakat setempat dengan kultur pedesaan yang lebih mengandalkan hasil-hasil pertanian sebagai basis pertahanan hidup.

¹⁵ Sulaiman Munandar, *Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya (Kajian Kerusuhan 1966 dan Pasca Kerusuhan 1997-2001)*, Disertasi Program Doktor Dalam Sosiologi Universitas Indonesia, 2003.

Geliat pasar-pasar “dadakan” yang sifatnya tradisional yang dibangun dari perilaku masyarakat desa dalam interaksi ekonomi, sedikit banyak mengalami pergeseran dengan munculnya pasar-pasar modern yang didukung modal yang cukup kuat. Masyarakat dari pelapisan sosial terbawah pelosok pedesaan pada akhirnya mengalami, meminjam istilah Clifford Geertz “*shared poverty*” atau kemiskinan bersama, karena masyarakat tidak bisa lagi secara optimal memenuhi kebutuhan ekonomi keseharian. Masih menurut Geertz, *share poverty*, akan terjadi, jika mekanisme pembagian pendapatan yang mempertahankan suatu derajat homogenitas sosial ekonomi kedalam potongan-potongan sosial ekonomi ke dalam potongan-potongan lebih kecil senantiasa bertambah jumlahnya.

Apakah masyarakat Temanggung yang selama ini mengandalkan sektor pertanian juga mengalami persoalan yang sama sebagaimana digambarkan Geertz? Jika sektor pertanian juga mengalami involusi dimana tingkat produktifitas yang tak menaik, terjadi pembagian tingkat nafkah yang rendah, dan ditambah hubungan masyarakat di sektor pertanian bersifat patron-client. Pola hubungan patron-client, selalu memiliki jarak sosial yang akan mengganggu pola interaksi sosial. Secara sosiologis interaksi sosial dapat dilihat sebagai suatu proses pertukaran diantara berbagai pihak dalam berinteraksi, dimana pihak-pihak itu saling berhubungan yang disebabkan oleh daya tarik pada pertukaran dengan mengharapkan ganjaran, baik instrinsik maupun ekstrinsik.

Dalam interaksi yang menunjukkan pertukaran tentu pertukaran yang tidak sebatas pada pertukaran-pertukran ekonomi, tetapi terdapat dalam hubungan apapun, termasuk pertukaran pertolongan dalam pekerjaan sehari-hari antar tetangga, antar teman sepergaulan, tukar menukar ide. Interaksi sosial yang disoriented seperti terganggunya jalinan sosial akibat interaksi sosial yang mengalami peretakan dapat menimbulkan dampak sosial yang sesungguhnya sangat rumit dan mampu menimbulkan keresahan-keresahan

sosial yang pada skala tertentu menjadi focal consent timbulnya konflik yang berujung kekerasan sosial sebagaimana terjadi di Temanggung tahun 2011.

Tingkah laku agresif masyarakat Temanggung yang terekspresikan dalam kekerasan sosial, menurut Ted Robert Gurr adalah timbulnya sikap ketidakpuasan atau discontents dimasyarakat luas sebagai akibat luas adanya jarak yang lebar antara value expectation dan values capabilities, sehingga masyarakat sungguh-sungguh merasakan adanya sesuatu yang hilang yang disebut *relative deprivation*.¹⁶ Lalu muncullah problem sosial yang menurut Jalaluddin Rakhmat, problem sosial adalah perbedaan antara das sollen (yang seharusnya kita inginkan terjadi) dan das sein (yang nyata yang terjadi). Lantas, apakah kekerasan sosial di Temanggung tahun 2011 sudah termasuk problem sosial dalam kategori relative deprivation? Termasuk kategori itu atau tidak masih tergantung pada precipitating factors atau factor peletus dan biasanya terlihat pada level intensity of commitment to values, yaitu adanya dukungan luas dari berbagai kelompok masyarakat dalam melancarkan aksinya.

Acapkali memang kemiskinan menjadi akar masalah dari konflik sosial. Perasaan tidak puas atas ketimpangan sosial yang dialami masyarakat, seringkali melahirkan anti tesis sebagaimana Ted Gurr ungkapkan, yaitu amuk massa sebagai salah satu cara bagaimana ekspresi perlawanan, pemberontakan itu disampaikan. Kenyataannya memang masyarakat sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai sosial capital yang ada di masyarakat, seperti; gotong royong, musyawarah, keswadayaan. Tekanan-tekanan sosial dengan cepat mampu menggeser tingkat kepercayaan sosial sebagai basis pertahanan dalam modal sosial. Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran

¹⁶ Robert. T. Gurr, *Why Men Rebel.* (New Yersey: Princeton University Press, 1970), hlm. 98

perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Gambaran kemiskinan secara konkret mungkin bisa dilihat dari kesenjangan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kualitas hidup, kerentanan terhadap kesehatan, kekuarangan gizi, serta tingginya tingkat pengangguran, itu menjadi kondisi yang sangat dibutuhkan bagi timbulnya konflik horizontal. Dalam kondisi masyarakat yang tidak normal kemiskinan yang tinggi masyarakat mudah marah.¹⁷

Masyarakat Temanggung tak lepas dari persoalan itu semua. Artinya bahwa kemiskinan merupakan problem yang kompleks, karena adanya kesenjangan antara pendapatan atau income yang diterima dengan belanja atau pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimal. Sementara masyarakat Indonesia tidak memiliki karakter yang sama dalam memangkas kesenjangan pendapatan. Disisi lain problem yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia pun sangat variatif, sehingga problem sosial yang terus berlarut-larut pada akhirnya terekspresikan melalui kekerasan sosial.

Kekerasan sosial yang berbasis identitas sosial agama yang terjadi di Kabupaten Temanggung sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ada kondisi yang dibutuhkan bagi terciptanya kekerasan sosial. Meskipun pemicu konflik bisa jadi dengan jubah identitas, tetapi identitas sosial hanyalah prasyarat terjadinya konflik sosial. Jadi dilihat dari konflik identitas sosial yang terjadi di Temanggung 2011, hal itu karena adanya tidakberdayaan masyarakat Temanggung dalam menyikapi persoalan-persoalan hidup. Kondisi perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian, merupakan persoalan tersendiri yang menyebabkan terjadinya distribusi yang tidak merata bagi penghasilan mereka. Mungkin masyarakat di pedesaan

¹⁷ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 62.

Temanggung boleh dikatakan menggunakan pola perekonomian untuk cukup hidup. Mereka memperoleh penghasilan dari sektor pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapaun *causa prima* dari konflik adalah identitas sosial keagamaan. Identitas sosial keagamaan menjadi penting karena mudah untuk dijadikan kendaraan menuju terjadinya konflik sosial. Sebab identitas keagamaan berkait erat dengan sikap-sikap intoleransi terhadap identitas yang lain. Di dalam identitas juga terselip sikap radikalisme, sektarianisme serta primordial. Dalam konteks Temanggung, identitas keagamaan seakan itu menjadi pertanda bahwa sektarianisme sudah menjadi sikap dan pilihan *silent majority* disana? Meski, sesungguhnya bahwa *silent majority* di Temanggung tidak setuju dengan sektarianisme sebagaimana dipromosikan oleh kaum radikalisme. Jadi ini merupakan pekerjaan rumah bagi kaum *silent majority* di Temanggung untuk mendedah kembali akar-akar radikalisme yang kian marak bersuara sumbang, yang sering dijadikan tumpangan bagi persoalan-persoalan lainnya seperti kemiskinan dan ketidakadilan, ketimpangan sosial.

Isu radikalisme juga menyeruak pasca terjadinya perusakan gereja di Temanggung, hal ini dengan jelaskan di paparkan oleh Gus Furqon saat penulis melakukan diskusi dan wawancara di gedung kantor PCNU kabupaten Temanggung, Gus Furqon mengatakan:

Konflik perusakan gereja yang akhirnya menyebabkan kekerasan sosial itu terjadi karena pemahaman agama para pelaku yang sangat dangkal, mereka sangat mudah dipancing oleh isu-isu agama, dan yang mengherankan juga bahwa mereka terkadang tidak mengerti substansi dari apa yang mereka lakukan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan isu terorisme yang lebih dahulu hadir di bumi Temanggung, pasca penangkapan teroris di Temanggung, maka otomatis perhatian

masyarakat luar terbentuk dan terstigma bahwa Temanggung adalah kota teror.¹⁸

Kekerasan sebagai bentuk manifestasi konflik sosial, sering muncul secara tiba-tiba dengan berbagai wajah pemicu. Pemicu bisa saja agama, politik, atau pertengkaran orang-perorang.¹⁹ Namun pada akhirnya selalu berujung pada kerusuhan sosial yang massive. Ini berarti bahwa kekerasan sosial tidaklah berdiri sendiri, beragam motif dan faktor pemicu yang mendorong timbulnya kekerasan sosial, entah itu kemiskinan, ketidakadilan, politik maupun ekonomi. Bahkan tak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini kekerasan sosial seringkali muncul dengan berlandaskan agama, apakah itu sentiment atau penistaan atau ketersinggungan dalam berinteraksi.

Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*Human Needs*) merupakan konsep kekerasan struktural (*Structural Violence*).²⁰ dimana Lebih lanjut Galtung mencoba menciptakan tiga dimensi kekerasan tersebut, kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Kekerasan langsung sering kali didasarkan atas penggunaan kekuasaan sumber (*resource power*).

Kenapa persoalan kekerasan sosial dengan motif agama belakangan ini menjadi mudah meledak hanya karena persoalan-persoalan yang sepele? Apakah ini ada yang salah dengan jalinan komunikasi antar umat beragama? Apakah kekerasan sosial di Temanggung hanya sekedar salah satu cara dari sekian banyak cara untuk menyelesaikan persoalan? Apakah kekerasan itu sesuatu cara bagaimana masyarakat menunjukkan perlawanannya terhadap

¹⁸ Hasil wawancara dengan Gus Furqon, pada tanggal 30 april 2015 di kantor PCNU Kabupaten Temanggung, Gus Furqon sendiri merupakan ketua PCNU kabupaten Temanggung untuk masa Khidmat 2014-2018

¹⁹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2002). hlm. 57

²⁰ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 105.

kebijakan oleh Negara? Ataukah ini bentuk kegagalan Negara dalam melindungi rakyatnya? Tentu banyak sederet pertanyaan yang harus dijawab. Lantas apa sesungguhnya akar masalah konflik Temanggung? Adakah ini berkaitan dengan adanya ketidakadilan sosial?

Pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya tidak mudah untuk menemukan jawabannya, karena kekerasan selalu bermetamorfosis dan berkelindan dibalik jubah yang berbeda-beda. Konflik Temanggung jika dilihat dalam perspektif teori transformasi konflik, ketimpangan sosial-ekonomi.

Seringkali konflik muncul disebabkan oleh persoalan ketimpangan sosial. Beberapa konflik di Indonesia seperti; di Ambon, Sambas bahwa konflik terjadi karena disebabkan oleh masalah-masalah ketimpangan sosial-ekonomi yang timbul karena tidak ada distribusi sumberdaya ekonomi secara merata. Di Temanggung ketimpangan sosial-ekonomi adalah pembicaraan yang sarat akan masalah keselarasan porsi ekonomi dan penempatan sesuatu pada tempatnya. Ketimpangan merupakan sebuah proses ketidakseimbangan terhadap keharusan yang harus diterima pihak lain yang sesuai dengan proporsinya. Adanya suatu keadaan yang tidak seimbang, berat sebelah atau tidak memihak terhadap masyarakat pinggiran selalu menyebabkan keresahan dikalangan masyarakat. Sehingga ketimpangan sosial ekonomi di Temanggung itu melahirkan kerusuhan sosial yang melibatkan massa adalah karena keadaan dimana terdapat kehendak dan tuntutan tertentu terhadap sesuatu, tetapi karena dorongan emosi atas tuntutan itu tidak didapat maka mereka cenderung destruktif, membuat onar dan anarkis, hingga pada akhirnya menimbulkan korban baik berupa materi maupun nyawa sesama manusia. Bisa jadi ini sesungguhnya bentuk protes sosial di kalangan kelompok tertentu yang merasa selama ini tidak diperhatikan secara ekonomi.

Sepertinya persoalan ini bisa dilihat dari bagaimana sumber-sumber ekonomi di Temanggung itu terdistribusikan secara proporsional. Seperti masalah tembakau yang dewasa ini menjadi persoalan sensitive di

Temanggung. Sebagai daerah penghasil tembakau terbesar mungkin secara ekonomi masyarakat Temanggung secara ekonomi lebih makmur dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang hanya mengandalkan sektor industri semata. Tetapi, yang terjadi justru bahwa para pelaku ekonomi tembakau lebih banyak dikuasai oleh pemilik modal bukan penduduk asli. Petani Temanggung tak lebih hanya sebagai buruh tani, karena semua lahan telah dikuasai oleh pemilik modal.²¹ Masyarakat yang terlibat dalam ekonomi tembakau adalah antara petani pemilik lahan/ juragan (patron) dengan buruh tembakau (client). Proses interaksi produksi tembakau tersebut, dimana kedua belah pihak memiliki saling ketergantungan yaitu satu pihak sebagai juragan (patron) atau pemilik lahan pertanian dan dipihak yang lain buruh tembakau (client). Disinilah letak perbedaan status ekonomi antara keduanya, yaitu adanya status kepemilikan lahan pertanian. Kepemilikan lahan pertanian oleh petani (patron), oleh buruh (client) dapat dijadikan mata pencaharian hidup. Hubungan patron-client yang terjalin antara juragan dan buruh ini merupakan interaksi timbal balik yang termasuk dalam bentuk suatu hubungan kerja.

Hubungan ini merupakan prinsip transaksi ekonomi elementer sebagai dasar pertukaran yaitu dengan terjadi pertukaran modal dan tenaga kerja, buruh dengan bermodalkan tenaga bekerja pada petani (juragan) sebagai pemilik lahan dengan imbalan berupa upah. Dalam hal ini, tentu buruh tembakau/ tani tidak memiliki bargaining yang kuat. Karena mereka hanya satuan terendah dari mata rantai perekonomian tembakau yaitu ada Pedagang tembakau/grader yang memberikan pinjaman modal terhadap petani/ juragan tembakau, ada buruh tani tembakau. Satuan mata rantai ini terus dipelihara karena masing-masing pihak merasa mendapat keuntungan. Pedagang tembakau memberikan pinjaman uang kepada petani tembakau dengan tujuan agar petani tembakau menjual tembakau kepada nya, dan

²¹ Wawancara dengan mbah Jumadi, petani tembakau di kaki gunung sindoro, tanggal 4 april 2015.

harga jual tembakau milik petani ditentukan oleh pedagang tembakau. Sementara petani tembakau (juragan) merasa harus meminjam modal sebagai keberlanjutan penanaman tembakau. Lantas, jika ada petani (juragan) menguasai sumber ekonomi tembakau, itu lantaran adanya system koneksi.

Belum lagi terjadinya penyempitan lahan yang disebabkan hilangnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi ladang industri dan perumahan. Persoalannya menjadi lebih rumit ketika masyarakat Temanggung yang selama ini hanya bergelut di sektor pertanian harus beralih profesi ke bidang lain yang tidak mereka kuasai. Maka terjadilah disorientasi kerja, pada akhirnya mereka lebih banyak menganggur. Kemudian penyempitan lahan pertanian sebagai basis pertahanan ekonomi masyarakat tidak berbanding lurus dengan peningkatan penduduk yang kemudian mengandalkan sektor yang sama membuat ekonomi masyarakat Temanggung mengalami stagnasi. Menurut teori *involution agriculture* Clifford Geertz, maka bisa dikatakan pertanian di temanggung telah mengalami kemandegan. Akibat dari kemandegan itu terjadilah apa yang disebut Geertz sebagai kemiskinan menular atau kemiskinan bersama.²²

Data tingginya kemiskinan masyarakat Temanggung bisa dilihat dari tingginya keluarga yang masuk kategori pra sejahtera, kira-kira hampir mencapai sepertiga dari seluruh jumlah keluarga yang ada di Temanggung atau sebanyak 60.898 keluarga atau sebesar 28,83 persen. Ini artinya bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung cukup tinggi. Sedangkan yang ekonomi di atasnya sedikit atau kategori Sejahtera I jika diprosentasekan mencapai 20.786 keluarga atau sekitar 9,84 persen. Jika keluarga pra sejahtera dan sejahtera I digabung dan bisa dimasukkan pada kategori miskin, maka total jumlah penduduk miskin Temanggung mencapai 81.664 keluarga atau

²² Clifford Geertz, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Barkeley: USA, 1970), hlm. 89

sekitar 38,67 persen.²³ Jadi sesungguhnya kemiskinan adalah realitas sosial masyarakat Temanggung saat ini. Maka meminjam teori Aristoteles (382-322 sm), bahwa kemiskinan yang tinggi di Temanggung sangat rasional sekali menimbulkan kerusuhan sosial. Sebab kerusuhan sosial yang terjadi di Temanggung adalah kausalitas dari polasisasi ekonomi kehidupan masyarakat setempat dengan kultur pedesaan yang lebih mengandalkan hasil-hasil pertanian sebagai basis pertahanan hidup. Kemiskinan inilah yang kemudian oleh Bupati Temanggung dianggap sebagai salah satu penyebab kerusuhan di Temanggung.

Aktor-Aktor Yang Berperan Dalam Konflik

Aktor konflik meliputi pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik baik secara langsung maupun tidak langsung, kepentingan serta hubungan di antara mereka, kapasitas yang dimiliki serta insentif yang ditawarkan bagi perdamaian. Dalam kasus ini pihak yang berkaitan secara langsung adalah terdakwa Antonius Richmond Bawengan serta beberapa orang Islam, Kristen dan Katholik yang pertama kali mengungkap dan membawa kasus ini kepada penegak hukum Kepolisian.

Hubungan di antara mereka, khususnya hubungan dengan Antonius Richmond Bawengan adalah berlawanan karena perilaku yang telah dilakukan Antonius Richmond Bawengan mengganggu penghayatan keagamaan mereka dengan menistakan simbol-simbol agama, baik Islam, Kristen maupun Katholik. Mereka memiliki kepentingan mengeliminasi perilaku Antonius Richmond Bawengan agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih meluas dengan tindakan penyerahan Antonius Richmond Bawengan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Secara jangka panjang tindakan ini

²³ Nina Sardjunani, Laporan Akhir: *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I*. (Jakarta: Direktorat Kependudukan, pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputian SDM dan Kebudayaan Bappenas, 2010)

akan menjaga kondisi tetap damai dan aman karena setiap masalah diselesaikan kepada penegak hukum.²⁴

Sedangkan kepentingan Antonius Richmond Bawengan sendiri tidak jelas karena tidak ada jawaban substantif yang diberikan. Jawaban yang keluar dari mulut Antonius Richmond Bawengan hanyalah jawaban normatif yang menimbulkan interpretasi umum dan tidak mengarah kepada maksud yang sesungguhnya. Banyak kecurigaan tentang konspirasi di balik sosok Antonius Richmond Bawengan, sesuatu yang semestinya ditindak lanjuti oleh polisi dan diungkapkan kepada publik. Adapun aktor-aktor yang tidak langsung dalam kasus ini adalah para tokoh ormas agama, kelompok masyarakat sipil (FUIB, FKUB, NU, Muhammadiyah, Paroki) serta Pemerintah Kabupaten Temanggung yang secara jelas memiliki kepentingan untuk menangani kasus ini dengan baik tanpa dampak destruktif serta membawa kepentingan insentif perdamaian jangka panjang.

Aktor-aktor tidak langsung ini telah berupaya secara optimal dengan usaha dan jejaring yang dimiliki untuk meredam dampak konflik yang diprediksikan muncul. Mereka membangun hubungan dan kontak yang erat dan bersepakat menghadapi masalah ini bersama-sama. Hal ini terbukti pada saat selesai kerusuhan para aktor ini dengan jejaringnya sampai di tingkat nasional melakukan upaya-upaya mengembalikan situasi dan menata kembali sisa-sisa kerusuhan. Mereka memiliki kesepakatan agenda perdamaian bahwa kondisi ini harus ditangani dan ditanggulangi bersama agar dimasa mendatang hal seperti ini tidak terjadi lagi.²⁵

Secara khusus Pemerintah Kabupaten Temanggung di bawah pimpinan bupati Bambang Sukarwo telah melakukan tindakan-tindakan kuratif dan antisipatif agar hal semacam ini tidak terjadi lagi di Temanggung. Upaya yang

²⁴ Fitriyah dan Dzunuwanus Ghulam Manar, *Anatomi Konflik Sosial Di Jawa Tengah: Studi Kasus Konflik Penistaan Agama Di Temanggung*, hlm. 7-9.

²⁵ Wawancara dengan Bapak As'ari Muhadi, Mantan Ketua PD Muhammadiyah dan pengurus FKUB Kabupaten Temanggung, tanggal 2 Mei 2015

menghabiskan banyak sumber daya (anggaran, tenaga dan waktu) ini terbukti secara efektif mengembalikan kondisi Temanggung ke arah kondisi yang damai dan tenang. Namun demikian munculnya massa yang melakukan berbagai tindakan provokatif tanpa bisa diidentifikasi, diatasi dan dijelaskan kepentingan dan insentifnya membuat konflik ini, khususnya kerusuhan yang terjadi karenanya, sangat sulit untuk dianalisis.

Tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan mendorong konflik bermanifestasi menjadi kerusuhan dan pengrusakan yang dilakukan oleh massa terhadap obyek-obyek yang tidak berkaitan dengan substansi konflik. Kerusuhan dan pengrusakan berlangsung sangat cepat dan semua pihak, termasuk polisi tidak dapat mengidentifikasi provokator kerusuhan dan pengrusakan. Para terdakwa yang ditangkap polisi dan diproses secara hukum sampai dengan menjalani hukuman penjara adalah orang-orang yang terprovokasi karena niat sejak awal meninggalkan rumah hanya menyaksikan sidang, tanpa adanya rencana dan indikasi persiapan melakukan kerusuhan dan pengrusakan. Sinyalemen ini sependapat dengan informasi yang disampaikan oleh para informan bahwa ada keganjilan tentang kejadian kerusuhan, yakni tentang ban yang dibakar di depan Pengadilan Negeri Temanggung (tidak diketahui asal-usulnya), orang-orang yang menyulut petasan, provokasi yang menghina dan merendahkan aparat (polisi), baik berupa sikap, perkataan maupun tindakan, provokasi informasi ada anak kyai yang tertembak serta massa yang sulit diidentifikasi sebagai orang Temanggung dari dialek dan pakaiannya.²⁶

Keanehan tersebut tidak terungkap sampai dengan saat ini sama halnya dengan motif pelaku Antonius Richmond Bawengan yang menyebarkan dokumen penistaan agama. Semestinya aparat hukum bisa

²⁶Wawancara dengan Bapak Yami Blumud, Mantan Ketua GP ANSOR 2010-2014, tanggal 22 April 2015

menuntaskan kasus ini dengan memaparkan kronologis, aktor, motif serta penggunaan sumber daya untuk melakukan aksi tersebut.

Transparansi penanganan kasus ini akan mempermudah penyelesaian konflik karena semua pihak mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pelaku konflik Antonius Richmond Bawengan maupun pelaku dan provokator kerusuhan yang datanya menjadi perbincangan masyarakat luas. Pelaku provokator kerusuhan menurut semua informan harus diungkap karena tidak mungkin provokasi ini dilakukan oleh orang Temanggung. Dengan bahasa yang lebih lugas masak orang Temanggung tega merusak daerahnya sendiri? Pernyataan ini juga didukung bukti-bukti adanya massa yang tidak teridentifikasi dengan jelas dari luar daerah, dibuktikan dengan sikap, tindakan dan dialek yang bukan ciri orang Temanggung serta banyaknya kendaraan bernomor luar Temanggung pada saat kerusuhan terjadi.²⁷ Terlebih tidak adanya pihak yang mendeklarasikan diri melakukan aksi-aksi rusuh dengan ideologi atau agendanya membuat kasus konflik dan kerusuhan ini menghadapi jalan buntu.

Bagi sebagian kalangan, ada persepsi permisif untuk melupakan begitu saja konflik dan kerusuhan ini tanpa adanya keinginan untuk menggali dan mempelajari pembelajaran di balik kejadian kerusuhan dan konflik tersebut. Dengan demikian, aktor-aktor di luar Antonius Richmond Bawengan dan massa dapat dipastikan motif, kepentingan dan kapasitasnya terhadap konflik yang terjadi. Berkaitan dengan Antonius Richmond Bawengan dan massa, pihak yang menginginkan konflik ini selesai dengan tuntas mesti melakukan penyelidikan dan penelitian lagi guna menemukan motif, kepentingan dan kapasitasnya.

Memang tidak mudah mengungkap secara tuntas terkait dengan konflik yang terjadi, konflik di temanggung sendiri sebenarnya tidaklah sebesar konflik yang terjadi di daerah lain seperti Aceh, Poso, Ambon dan

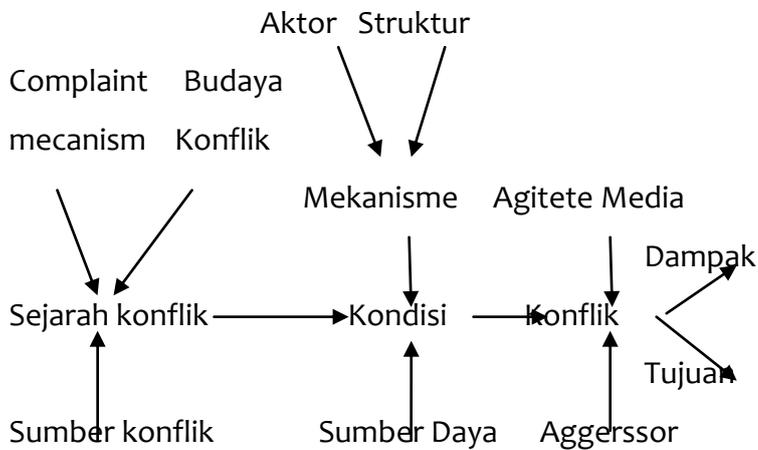
²⁷Wawancara dengan bapak Catur, seorang pengacara, tanggal 20 April 2015

sebagaimana yang memang benar-benar terjadi kekerasan antara masyarakat sipil, adat dan aparat negara. Pada kasus tersebut memang konflik yang terjadi di Aceh, Poso, dan Ambon merupakan konflik dalam kategori konflik penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan konflik komunal atau “*perang sipil*” antar komunitas beda etnis dan agama.²⁸

Secara sederhana konflik yang terjadi di Temanggung akibat dari perusakan Gereja dapat dilihat dibawah ini (gambar skema konflik Temanggung). Dimana konflik yang terjadi memiliki sejarah yang sejarah itu berkaitan dengan sumber konflik yang terjadi, kemudian konflik tersebut memicu adanya mekanisme keluhan (*Complaint mechanism*) dan Budaya Konflik yang terjadi, setelah adanya sumber konflik maka otomatis akan tercipta kondisi yang ditimbulkan dari sumber tersebut, kondisi ini dapat dipicu oleh dua faktor yaitu mekanisme yang berhubungan dengan aktor dan struktur yang ada, kemudian terkait juga dengan sumber daya, baik sumber daya alam dalam hal ini adalah tembakau ataupun sumber manusianya yang ada, akibat dari kondisi yang tidak kondusif tersebut maka munculah konflik, konflik itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pengaruh media dalam pemberitaan ke publik serta orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap gereja akibat ketidakpuasan mereka dari hasil persidangan, dan yang terakhir dari konflik tersebut menimbulkan dampak dan tujuan.²⁹

²⁸ Lambang Trijono, Nazib Azca Dkk, *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada dan Southeast Asian Conflict Studies Network Universitas Sain Malaysia, 2004), hlm. 6

²⁹ Sumber skema ini penulis dapatkan ketika mengikuti perkuliahan Sosiologi Agama dan Psikologi Agama untuk Resolusi Konflik bersama Dr. Munawar Ahmad, M.Si semester II Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.



Gambar skema konflik

Kesimpulan

Konflik perusakan gereja di Temanggung adalah konflik yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga arus informasi yang datang dari luar serta provokasi buta yang hadir secara tiba-tiba, tetapi meskipun seperti itu upaya-upaya sudah banyak sekali dilakukan oleh semua elemen seperti pemerintah, pihak TNI/Polri, tokoh agama, lembaga keagamaan dan masyarakat itu sendiri. Upaya-upaya tersebut lahir dari keinginan kuat untuk segera meredam konflik yang ada dengan saling bahu membahu, hal ini ditunjukkan oleh semua unsur yang ada, seperti dengan melakukan pertemuan-pertemuan lintas tokoh baik tokoh masyarakat, agama dan pemerintah, kemudian melakukan pengamanan yang lebih ekstra dan kuat seperti yang dilakukan oleh TNI melalui satuan Babinsa nya yang disebar disetiap desa. Selain juga ada upaya-upaya untuk membatu para korban dari peristiwa tersebut seperti yang dilakukan oleh MDMC yang terjun ikut membantu dalam proses penanganan komplik yang terjadi.

Mencermati kasus konflik dan kerusakan Temanggung dapat diketahui bahwa secara nyata durasi kerusakan hanya 1-2 jam saja, namun durasi konflik bisa jadi lebih lama mengingat vonis pengadilan terhadap terdakwa penistaan

agama menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat. Terlebih dengan adanya kerusuhan menambah penderitaan dan menimbulkan asumsi-asumsi negatif serta kecurigaan antara satu pihak dengan pihak lain. Ranah ini sangat sensitif bahkan dalam penelitian ini sampai ada pihak yang keberatan untuk mendiskusikan dan menjadi informan karena khawatir dengan akibat yang tidak diinginkan. Beberapa informan juga agak tertutup untuk mendiskusikan dinamika konflik ini, khususnya yang berkaitan dengan skenario, resiko dan asumsi. Mengingat konflik ini diputuskan dengan terpaksa (adanya vonis hakim, kerusuhan dan terdakwa yang diamankan ke luar Temanggung) maka dinamika konflik yang terjadi kurang mampu dideskripsikan secara lebih detail. Yang muncul kemudian adalah pernyataan-pernyataan normatif tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak, yakni *cooling down* dan antisipatif, baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, ormas keagamaan maupun Pemerintah Kabupaten Temanggung. Banyak pihak berusaha untuk menutup rapat dan melupakan konflik serta kerusuhan ini serta mengajak untuk melihat ke depan dan menjaga atau mencegah agar kejadian serupa ini tidak terulang.

Ajakan ini disertai dengan upaya-upaya penyuluhan hukum oleh pemerintah serta pengajian dan pembinaan umat. Pendekatan atas konflik yang seperti ini nampaknya lazim dilakukan seperti tercermin dari sebuah ungkapan Jawa *sing uwis yo uwis! Sudahlah, yang sudah terjadi biarkan saja*. Upaya ini bisa saja berhasil meredam konflik dalam jangka pendek namun ketidakjelasan skenario, motif dan resiko menyelesaikan konflik bisa jadi memicu konflik jangka panjang, sebab pendekatan konflik yang emosional dan rasional akan memberikan hasil yang berbeda. Skenario yang mungkin dilakukan untuk mengakhiri konflik ini kurang terdeskripsi dan terancang secara jelas karena yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah tindakan normatif berupa penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat

untuk mencegah hal serupa muncul kembali. Tidak diketemukan adanya desain untuk mengakhiri konflik secara sistematis dan transparan.

Daftar Pustaka

- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, Cet. Ke-1
Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Fitriyah dan Dzunuwanus Ghulam Manar, *Anatomi Konflik Sosial Di Jawa Tengah: Studi Kasus Konflik Penistaan Agama Di Temanggung*, 2012.
- Geertz, Clifford, *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: USA, 1970.
- Hugh Miall Dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kimball, Charles, *Kala Agama Jadi Bencana*, Bandung: Mizan, 2003.
- Maalouf, Amin, *In The Name of Identity* Yogyakarta: Resist Book, 2004
- Muhammad, Afif, *Agama dan Konflik Sosial, Studi Pengalaman Indonesia*, Bandung: Marja, 2013.
- Munandar, Sulaiman, *Konflik Multi Dimensi Masyarakat Tasikmalaya (Kajian Kerusuhan 1966 dan Pasca Kerusuhan 1997-2001)*, Disertasi Program Doktor Dalam Sosiologi Universitas Indonesia, 2003.
- Pelly, Usman, *Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia : Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi*. Dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. No. 58 Tahun 1990.
- Sardjunani, Nina, *Laporan Akhir: Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I*. (Jakarta: Direktorat Kependudukan, pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kedeputan SDM dan Kebudayaan Bappenas, 2010

Suparto, Diryo, *Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung, Kajian Kekerasan Sosial Di Temanggung Tahun 2011*, 2013.

Susan, Novri, *Negara Gagal Mengelola Konflik, Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014

Syam, Nur, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm. 62.

Trijono, Lambang, Nazib Azca Dkk, *Potret Retak Nusantara: Sruji Kasus Konflik di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada dan Southeast Asian Conflict Studies Network Universitas Sain Malaysia, 2004.

T. Gurr Robert., *Why Men Rebel.* (New Yerse: Princeton University Press, 1970.

Wawancara

wawancara dengan Gus Furqon, pada tanggal 30 april 2015 di kantor PCNU Kabupaten Temanggung, Gus Furqon sendiri merupakan ketua PCNU kabupaten Temanggung untuk masa Khidmat 2014-2018

wawancara dengan Abaz Zahrotien pada tanggal 23 April 2015, Abaz sendiri merupakan seorang jurnalis dari media jawa pos yang bertugas di Radar kedu serta meliput kejadian kerusuhan pada saat kerusuhan berlangsung

wawancara dengan Kyai Sihabuddin, Ketua FPI Jawa Tengah, tanggal 8 April 2015

wawancara dengan Iwan Setyawan, pada tanggal 16 April 2015, Iwan sendiri merupakan masyarakat katolik yang tinggal dibelakang pasar Kliwon yang bersebelahan dengan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Temanggung.

wawancara dengan AKP Setuiya Budi (Kasat Intelkam Polres Temanggung),
tanggal 23 2015

wawancara dengan Bapak As'ari Muhadi, Mantan Ketua PD Muhammadiyah
dan pengurus FKUB Kabupaten Temanggung, tanggal 2 Mei 2015

wawancara dengan Bapak Yami Blumud, Mantan Ketua GP ANSOR 2010-2014,
tanggal 22 April 2015

wawancara dengan bapak Catur, seorang pengacara, tanggal 20 April 2015

wawancara dengan Gus Furqon, pada tanggal 30 april 2015 di kantor PCNU
Kabupaten Temanggung, Gus Furqon sendiri merupakan ketua PCNU
kabupaten Temanggung untuk masa Khidmat 2014-2018